

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada Desember 2019, kasus pertama pneumonia serius dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Kasus pertama di Wuhan. Sejak 18 Desember hingga 29 Desember 2019, sebanyak lima orang terdiagnosis Sindrom Gangguan Pernafasan Akut (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020, jumlah kasus bertambah, terbukti dengan penambahan 44 kasus baru. Dalam waktu kurang dari sebulan, penyakit tersebut telah menyebar ke beberapa provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. 3 sampel yang diteliti mengungkap etiologi virus corona baru. Awalnya dikenal sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), penyakit ini berganti nama menjadi Coronavirus Disease (COVID-19) pada 11 Februari 2020, setelah disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (Susilo et al. 2020).

Tahun 2020 adalah tahun munculnya wabah Covid-19 di Indonesia, yang bermula di Wuhan, China, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Data global per 2 Juni 2020 menunjukkan jumlah penduduk dunia sebanyak 6.140.934 orang, dunia 216 orang, dan dunia 373.548 orang. Selain itu, menurut data dari Indonesia, ada 27.549 orang yang tinggal di 34 provinsi positif Covid-19, dan 1.663 orang yang tinggal di negara lain. Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dunia ini praktis membuat seluruh negara di dunia harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19 (Perencanaan et al. 2020).

Semakin maraknya penyebar luas Covid-19 ini tentu pemerintah tidak tinggal diam dalam hal ini, berbagai upaya pemerintah lakukan untuk memutuskan tali penyebar virus Covid-19 ini dengan berbagai hal, Lockdown seluruh dunia, penyemprotan Disinfectan, memberi hand sanitizer gratis, memberi masker gratis, memberi vitamin, menyediakan tempat untuk cuci tangan di area terbuka, memberi vaksinasi gratis, mengadakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) , pemerintah juga telah menerapkan physical distancing, dan social distancing.

Pembatasan Aktivitas: <i>overview</i> pembatasan sektoral			
Berdasarkan Pergub 33/2020, Pergub 79/2020 dan Pergub 88/2020			
Aktivitas	PSBB (10 April – 3 Juni)	PSBB Transisi (4 Juni – 13 September)	PSBB (Mulai 14 September)
Kantor/Instansi Pemerintah Pusat maupun daerah	Beroperasi (100%) & mengikuti protokol kesehatan	Buka dengan max 50% kapasitas & mengikuti protokol kesehatan	Buka dengan max 25% kapasitas, mengikuti SE KemenPAN-RB di zona merah
Kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya	Beroperasi (100%) & mengikuti protokol kesehatan	Buka dengan max 50% kapasitas & mengikuti protokol kesehatan	Buka dengan max 50% kapasitas & mengikuti protokol kesehatan
BUMD/BUMN yang turut serta dalam penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat	Beroperasi (100%) & mengikuti protokol kesehatan	Buka dengan max 50% kapasitas & mengikuti protokol kesehatan	Buka dengan max 50% kapasitas & mengikuti protokol kesehatan
Organisasi Kemasyarakatan lokal & internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial	Beroperasi (100%) & mengikuti protokol kesehatan	Buka dengan max 50% kapasitas & mengikuti protokol kesehatan	Buka dengan max 50% kapasitas & mengikuti protokol kesehatan

Gambar 1. 1 Kebijakan pembatasan sosial

*Sumber: Beda PSBB Transisi Pertama Juni dan PSBB Transisi Oktober di Jakarta*

Di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai strategi dalam menangani penambahan kasus positif COVID-19. Adapun strategi yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia terbagi menjadi empat hal yaitu dilaksanakan secara konsisten, yaitu: 1) kewajiban pakai masker saat di tempat umum atau di luar rumah, 2) penelusuran kontak (tracing) kasus positif yang dirawat dengan menggunakan tes cepat, 3) pendidikan dan pengaturan isolasi diri aktif beberapa hasil penelusuran yang menunjukkan hasil tes positif dari tes cepat atau negatif dengan gejala isolasi mandiri, 4) strategi selanjutnya adalah isolasi rumah sakit apa yang harus dilakukan saat mengisolasi diri, tidak dapat dieksekusi. Sedangkan fisik menjaga jarak adalah strategi dasar untuk mengatasi pandemi COVID-19. Selain itu, di bidang ekonomi pemerintah

juga menegakkan Jaring Pengaman Sosial untuk membantu orang melewati masa pandemi COVID-19 (Ikmal and Noor 2022)

Adanya covid-19 ini berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat, dimana masyarakat merasa banyak hal yang harus terhenti karena adanya pandemic covid-19 tersebut. Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang penting dalam kehidupan, kesejahteraan masyarakat merupakan pondasi dalam membangun kehidupan yang berlanjut. Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya adalah sebuah negara lingkungan sosial yang memungkinkan bagi semua orang warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik hidup spiritual dan sosial sesuai dengan kodratnya dan martabat manusia untuk dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi oleh diri sendiri, keluarga dan masyarakat untuk berkembang menjadi lebih baik.

Pemerintah perlu berkolaborasi bersama masyarakat dalam membentuk kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga hasil dari kolaborasi pemerintah dan masyarakat lebih efektif dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kolaborasi pemerintah itu sendiri merupakan sebuah kerja sama antara pemerintah dan pihak lainnya untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada, sehingga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak lainnya, sebab kolaborasi pemerintah juga menciptakan kepemilikan bersama terhadap masalah tersebut.

Konsep Collaborative Governance adalah upaya pemerintah untuk memecahkan masalah yang kompleks, menekankan saling ketergantungan antara pemerintah dan aktor non-negara lainnya. Permasalahan tersebut bersifat kompleks dan dinamis, sehingga tidak mungkin hanya satu organisasi yang dapat menyelesaikannya yaitu pemerintah, namun penyelesaiannya memerlukan kerjasama.

Kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama, interaksi, kompromi antara beberapa unsur yang saling berhubungan serta orang, lembaga dan/atau pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dan menerima akibat dan manfaat (Haryono 2012).

Upaya peningkatan tingkat kesejahteraan Sosial dapat dilihat sebagai bagian dari investasi sosial yang ditargetkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga mampu melaksanakan tugas hidup mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak untuk kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan Media sosial bisa jadi solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan tren Primordialisme dan Eksklusivisme dapat mengancam kehidupan bangsa Indonesia. Jika kondisi ini diabaikan, itu akan mengarah dalam terjadinya konflik horizontal yang selanjutnya akan dapat menyebabkan disintegrasi sosial yang sangat merugikan.(Achmad Fathoe Choer, Shaqila Sendi Permata Cinta, and Shifa Septefany 2022)

Salah satu kesejahteraan yang menurun juga dirasakan oleh nelayan. Telah kita ketahui bahwa nelayan mempunyai karakter hidup yang berbeda hal ini disebabkan oleh perbedaan pola kehidupan yang terbentuk dari kehidupan di laut yang tidak pernah dirasakan oleh masyarakat yang lain dimana kehidupan di lautan mempunyai resiko yang besar, terkhusus resiko dari alam. Kesusahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan itu dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor-faktornya yaitu, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan modal usaha dan informasi dalam teknologi penangkapan.(Gorahe, Waani, and Tasik 2021)

Dalam kondisi wabah Covid-19, nelayan kecil adalah yang paling banyak menderita di sektor perikanan. Penjualan hasil tangkapan menjadi kendala besar ketika Hal ini dikarenakan banyak pengepul ikan yang tidak melayani atau membatasi

pembelian ikan dari nelayan dan petani. Kondisi ini menyebabkan banyak nelayan dan pembudidaya yang kewalahan menjual hasil tangkapannya. Nasib nelayan terpuruk akibat jatuhnya harga ikan hingga 50 persen seiring dengan semakin masifnya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan permintaan yang menurun. Menurun Permintaan global untuk makanan laut ini adalah akibat dari krisis Covid-19. Meskipun makanan adalah layanan terpenting di seluruh dunia termasuk Indonesia, Pertumbuhannya melambat sejak wabah Covid-19 (Mery Nova Sari, Fransiska Yuliasara, and Mahmiah 2020)

Nelayan merupakan sebuah kumpulan masyarakat yang memiliki kehidupan bergantung pada hasil lautan, dengan melakukan sebuah penangkapan maupun budidaya. Yang kita ketahui bahwa nelayansendiri tinggal di daerah pantai ataupun piggir pantai. Sebagian besar nelayan bermata pencharian yang berkaitan dengan laut. (Ningrum 2021). Nelayan adalah suatu komunitas masyarakat yang cara hidupnya dipengaruhi oleh cuaca. Penyakit dapat menyebabkan keadaan ekonomi seseorang memburuk, bahkan sampai kolaps. Akibatnya, perekonomian mengalami ketidakstabilan. Mengingat kebutuhan sehari-hari dari waktu ke waktu, barang-barang rumah tangga semakin mahal sehingga hal ini akan mendorong nelayan untuk mengambil tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka(Hamzah and Nurdin 2021)

Kabupaten yang terdampak bagi nelayan yaitu salah satunya Kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun merupakan wilayah yang memiliki potensi perikanan khususnya perikanan laut yang sangat melimpah karena sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Luas wilayah laut Kabupaten Karimun adalah 397.878 Ha yang merupakan 80,92% dari luas daratan Kabupaten Karimun. Bagi nelayan pandemic ini

banyak membuat kerugian sehingga kesejahteraan nelayan menurun akibat adanya covid-19 ini. Kesejahteraan nelayan menurun karena nelayan susah memenuhi kebutuhan pokok selama pandemic.

“ Selama pandemic covid-19 ini, sudah pasti mendapat kerugian bagi nelayan seperti saya, dan juga selama pandemic membuat kegiatan nelayan terhenti. Sehingga kami susah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang kurang.. Kami sangat butuh perhatian dari pemerintah untuk memberikan kami bantuan agar kehidupan kami seperti dulu walaupun tidak 100%,” Ujar pak Jemahat sebagai salah satu nelayan di desa Pangke.

Desa yang terkena dampak dari pandemic yaitu salah satunya desa Pangke dimana 35% penduduk desa Pangke memiliki profesi sebagai nelayan. Desa Pangke terletak di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Di desa Pangke nelayan merasakan kerugian sebanyak 50% yang disebabkan dengan pandemic ini.

## **2.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti membentuk beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Siapa aktor yang terlibat dalam peningkatan kesejahteraan nelayan pasca pandemic covid-19 di desa Pangke dalam perspektif *collaborative governance*?
2. Bagaimana proses peningkatan kesejahteraan nelayan pasca pandemic covid-19 di desa Pangke dalam perspektif *collaborative governance*?

## **2.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam peningkatan kesejahteraan nelayan pasca pandemic covid-19 dalam perspektif *collaborative governance*

2. Untuk memahami bagaimana proses *collaborative governance* terhadap keterlibatan actor dalam peningkatan kesejahteraan nelayan pasca pandemic-19 dalam prespektif *collaborative governance*.

### **1.3.2 Manfaat penelitian**

#### **1. Secara teoritis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui terkait peningkatan kesejahteraan nelayan pasca pandemic covid-19 dalam prespektif *collaborative governance*.

#### **2. Secara praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi peneliti

Peneliti dapat pengetahuan baru terkait peningkatan kesejahteraan nelayan pasca pandemic covid-19 dalam prespektif *collaborative governance*.

2. Bagi masyarakat

Menambah wawasan terkait peningkatan kesejahteraan nelayan pasca pandemic covid-19 dalam prespektif *collaborative governance*.

3. Bagi peneliti lainnya

Diharapkan penelitian yang ditulis ini bisa berguna sebagai referensi dan informasi terkait peningkatan kesejahteraan nelayan pasca pandemic covid-19 dalam prespektif *collaborative governance*.

### 2.3. Literature Review

Pada penelitian yang sudah banyak mengangkat tema tentang bagaimana kesejahteraan nelayan di era pandemic dan pasca pandemic covid-19 ini, maka perlu perbandingan yang harus sebandingn agar bisa mengembangkan kembali kualitas dari penulisan yang ada.

Dari penulisan (Muhammad Natsir Kholis, Fratnesi 2022) yang berjudul (*Strategi Bertahan Hidup Nelayan Pasca Covid-19: Kasus Nelayan Jaring Insang Kota Bengkulu*), dan jurnal dari (Hamzah and Nurdin 2021) yang berjudul (*Strategi Adaptasi Nelayan Selama Pandemi Covid-19 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu*), kemudian jurnal dari (Ramdayanti, Argenti, and Marsingga 2021) yang berjudul (*Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang*) selanjutnya dari jurnal (Titik and Nugroho 2021) yang berjudul (*Respon Awal Petani, Nelayan, dan Usaha Mikro, Terhadap Bantuan COVID-19*) dan yang berikutnya jurnal dari (Kholis, Fratnesi, and Wahidin 2020) yang berjudul (*Prediksi Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Nelayan Jaring Insang di Kota Bengkulu*) di mana ketiga jurnal ini membahas terkait bagaimana strategi pemerintah dan nelayan dalam bertahan hidup di era pandemic dan pasca pandemic, bagaimana bentuk strategi pemerintah dalam membantu nelayan di era pandemic dan pasca pandemic covid-19, respon nelayan dalam melewati keadaan di era pandemic ini. kelima jurnal ini berfokus kepada bentuk strategi pemerintah dalam membantu nelayan, bagaimana respon nelayan saat awal pandemic, bagaimana nelayan bertahan hidup di era pandemic. Sedangkan yang sedang dilakukan peneliti yaitu berfokus pada bagaimana collaborative governance dalam membantu atau meningkatkan kesejahteraan nelayan di era pandemic dan pasca pandemic dengan program digitalisasi.

Pada jurnal (Septya et al. 2022) yang berjudul (*Perubahan Sosial Masyarakat Nelayan Kecamatan Sungai Apit Akibat Rekayasa Sosiasal Pandemi Covid-19*), selanjutnya (Muthmainnah and Fatah 2021) yang berjudul (*Keberlanjutan Kegiatan Perikanan Darat Nelayan Skala Kecil Selama Masa Pandemi Covid-19 dan Mendatang (Studi Kasus di Danau Semayang, Kalimantan timur)*), kemudian jurnal dari (Rumfabe, Wurarah, and Parinusa 2021) yang berjudul (*Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Nelayan Tradisional di Kelurahan Pasir Putih Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari (Studi Kasus Nelayan di Wilayah Pasirindo)*), berikutnya jurnal dari (Sriyono and Dewi 2021) yang berjudul (*Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Era New Realiti Melalui Model Pembiayaan Inklusif: Prespektif Al Mudharobah*) dan yang terakhir jurnal dari (Hendrik 2011) yang berjudul (*Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Pulau Besar Dan Danau Bawah Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Propinsi Riau*). Dari kelima jurnal tersebut banyak terfokus terhadap kesejahteraan nelayan di era pandemic covid-19 ini, dimana terfokus kesejahteraan nelayan banyak menurun akibat adanya pandemic ini, sehingga nelayan butuh bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan berbagai bentuk bantuan dari pemerintah. Sedangkan yang lagi peneliti lakukan yaitu terfokus pada siapa saja actor yang terlibat dari kolaborasi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan program digitalisasi era pandemic dan pasca pandemic.

Jurnal yang telah di lakukan oleh (Susanto, Salsabila, and Khalifa 2022) yang berjudul (*Dampak Pandemi Covid-19 pada kelayakan Usaha Perikanan Rajunngan di Teluk Banten*), selanjutnya jurnal dari (Mery Nova Sari, Fransiska Yuliasara, and Mahmiah 2020) yang berjudul (*Dampak Virus Corona (Covid-19) Terhadap Sektor*

*Kelautan dan Perikanan : A Literature Review*), berikutnya, jurnal dari (Achmad Fathoe Choer, Shaqila Sendi Permata Cinta, and Shifa Septefany 2022) yang berjudul (*Peran Pemerintah Daerah Dalam Menjamin Kesejahteraan Rakyat Selama Masa Pandemi Covid-19*) kemudian, jurnal dari (Cahyandi, Maritim, and Cilacap 2022) yang berjudul (*Pengaruh Penyebaran Corona Virus Disease(Covid-19) Pada Pendapatan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Cilacap*), yang terakhir jurnal dari (Nasrullah and Annisa 2021) yang berjudul (*Analisis Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tanah Laut Pada Masa Pandemi Covid-19*). Dari kelima jurnal ini membahas terkait dampak pandemic covid bagi nelayan, pengaruh adanya pandemic bagi pendapatan nelayan, bagaimana peran pemerintah dalam membantu nelayan. Perbedaan dengan peneliti yang sedang dilakukan yaitu, peneliti berfokus pada proram digitalisasi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan era pandemic dan pasca pandemic.

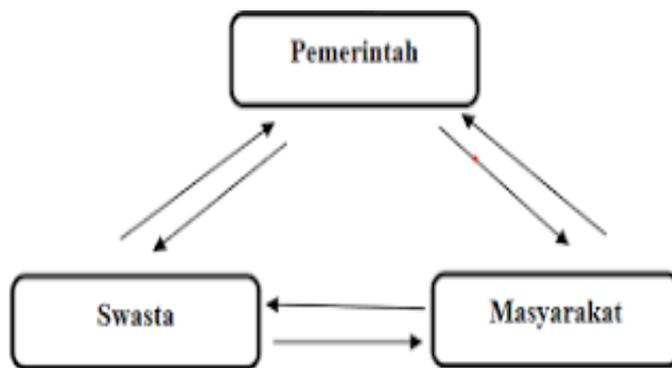
## **2.4. Kerangka Teori**

### **1.5.1 Kolaborasi Pemerintah (collaborative governance)**

Collaborative governance merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah. Collaborative governance merupakan instrumen yang tepat untuk berkonfrontasi dengan masalah, sebab collaborative governance menciptakan "kepemilikan bersama" terhadap masalah tersebut (Ansell and Gash 2008). Tata Kelola Kolaboratif adalah salah satu dari beberapa jenis pemerintah/tata pemerintah di mana aktor publik dan swasta bekerja dengan cara yang sama, menggunakan prosedur sebelumnya mengubah hukum atau aturan opini publik . Tata kelola kolaboratif juga fungsi yang mengelola lebih dari satu lembaga publik secara langsung untuk terhubung dengan pemangku kepentingan non-publik

dalam Langkah-langkah untuk membuat keputusan bersama yang formal, berorientasi konsensus dan musyawarah dengan tujuan menggambarkan dan melaksanakan kebijakan publik dan juga mengatur program atau aset bersama (Ansell and Gash 2008). Tata Kelola Kolaboratif adalah pengembangan berbasis konsep tiga pilar demokrasi adalah pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil. Nilai dari pendekatan ini dapat dilihat dari keterlibatan aktif masyarakat sipil dan atau pihak swasta yang menjadi objek perkembangan (Yunas and Nailufar 2019)

Yunas dan Nailufar (2019) berpendapat terdapat tiga pilar dari kolaborasi pemerintah, yaitu:



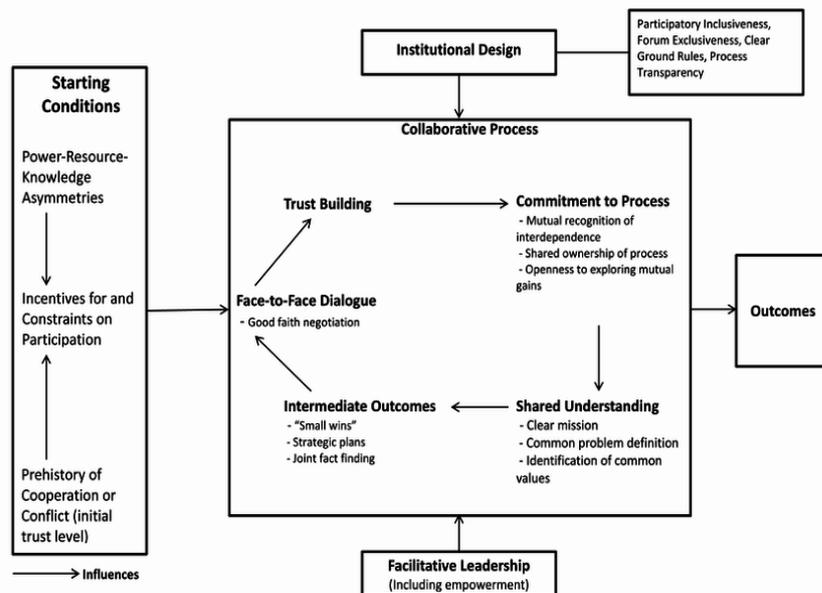
Gambar 1. 2 Tiga pilar kolaborasi pemerintah

*Sumber: Abidin dkk 2013*

Ada tiga aspek dalam tata kelola koperasi. Dimensi pertama adalah mencapai tujuan pelanggan untuk memperkuat kerjasama untuk meningkatkan sumber daya yang dapat meningkatkan pelayanan. Pada dimensi kedua, hubungan antar organisasi ditingkatkan dengan tujuan memperoleh manfaat kolektif dan potensi kerjasama organisasi. Jika kemitraan dilakukan dengan benar, maka akan membawa manfaat berupa peningkatan modal sosial masyarakat yang dilayani.

Hubungan yang baik antar organisasi memberikan peluang untuk memecahkan masalah dan membuka jalan bagi hubungan yang lebih baik di masa depan. Dimensi ketiga, pengembangan organisasi membawa manfaat besar secara langsung. Jika kerjasama meningkatkan pertumbuhan organisasi, itu akan membantu mencapai tujuan dan meningkatkan daya saing (Bila and Saputra 2019)

Dalam konsep Collaborative Governance terdapat beberapa tahapan kolaborasi, berbagai tahapan tersebut sangat penting untuk dimaksimalkan dalam mengelola bisnis publik, dalam hal ini proses kolaboratif masih sulit dilaksanakan karena memang setiap pemangku kepentingan berbeda sifat dan karakternya menurut (Ansell and Gash 2008)



Gambar 1. 3 Konsep collaborative governance

*Sumber: konsep collaborative governance menurut (Ansell and Gash 2008)*

Dalam proses kolaboratif ini, Ansel dan Gash memberikan gambaran bahwa setiap proses harus memiliki berbagai komponen mulai dari kondisi awal,

kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, proses kolaboratif. Dan dari berbagai proses tersebut dilanjutkan dengan beberapa proses lagi sebagai berikut:

1. *Face to Face Dialoge*

Dalam collaborative governance berbagai dialog dilakukan dengan tatap muka dari tiap pemangku kepentingan yang ada, dialog yang dilakukan ini sangatlah penting karena memang dalam proses collaborative governance berorientasi terhadap proses, dan juga mampu untuk menganalisa berbagai peluang maupun keuntungan bersama.

2. *Trust Building*

Dalam proses kolaborasi kepercayaan sangatlah penting untuk dibangun, dalam awal kolaborasi tidak jarang para pemangku kepentingan masih memiliki rasa kepercayaan yang kurang dimiliki, dalam proses membangun kepercayaan ini harus diutamakan, agar jika kolaborasi pertama dilakukan kepercayaan sudah ada, dan para pemangku kepentingan tidak di kuasai oleh rasa egois antar institusi.

3. *Commitment to process*

Dalam proses kolaborasi itu sendiri juga dibutuhkan komitmen yang kuat. karena ini menjadi penyemangat untuk bisa berpartisipasi secara kolaboratif pemerintahan. Fungsi dari komitmen ini adalah untuk dapat mencegah risiko yang akan terjadi terjadi dari kolaborasi.

4. *Share understanding*

Setiap pemangku kepentingan harus berbagi pemahaman tentang apa yang perlu mereka capai dalam kolaborasi, dalam proses berbagi pemahaman ini dapat menciptakan rasa yang kuat dalam melaksanakan tujuan bersama, visi bersama, ideologi dan lain-lain.

#### 5. *Intermidate outcomes*

Hasil dari proses kolaboratif dapat dicapai dalam bentuk hasil yang nyata ini adalah bukti nyata dari proses kritis dan esensial pada saat itu mengembangkan momentum yang mampu membimbing untuk mencapai kesuksesan dari kerjasama. Hasil antara ini berfungsi jika tujuannya adalah mungkin dan manfaat dari kerjasama.

Di era yang semakin maju ini, pemerintah juga perlu melakukan berbagai inovasi dalam menentukan efektivitas kebijakan yang dibuatnya dalam berbagai kasus yang dihadapinya, tentunya perlu ditingkatkan kerjasama antar pihak yang dapat memfasilitasi dan meningkatkan efektifitas hasil yang dibangun, berbagai kepentingan hadir tentunya Melibatkan banyak pihak, oleh karena itu diperlukan kerjasama yang teratur sebut pemerintahan kolaboratif.

Kolaborasi pemerintah terdiri dari banyak aktor yang mengambil bagian dalam kerjasama, seperti pemerintah, swasta dan juga masyarakat. Karena itu di soal penetapan kebijakan atau peningkatan kerjasama tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, membutuhkan pihak lain untuk bekerja sama dengan tindakan yang benar sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ada sebelumnya dalam tata kelola kolaboratif.

#### **1.5.2 Kesejahteraan Nelayan**

Menurut Badrudin (2012) Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang menunjukkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari

standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang terlihat dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan akan sandang (pakaian) dan pangan (makanan), pendidikan, dan kesehatan, atau keadaan dimana seseorang mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang penting dalam kehidupan, kesejahteraan masyarakat merupakan pondasi dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial yaitu kondisi yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri.

Untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu masyarakat atau kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, yaitu tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk konsumsi pangan dan non-pangan, tingkat pendidikan keluarganya, dan tingkat kesehatan keluarga (BPS Indonesia 2014).

Nelayan merupakan sebuah kumpulan masyarakat yang memiliki kehidupan bergantung pada hasil lautan, dengan melakukan sebuah penangkapan maupun budidaya. Yang kita ketahui bahwa nelayan sendiri tinggal di daerah pantai ataupun piggir pantai. Sebagian besar nelayan bermata pencharian yang berkaitan dengan laut. (Ningrum 2021).

Nelayan adalah suatu komunitas masyarakat yang cara hidupnya dipengaruhi oleh cuaca. Penyakit dapat menyebabkan keadaan ekonomi seseorang memburuk, bahkan sampai kolaps. Akibatnya, perekonomian mengalami ketidakstabilan.

Mengingat kebutuhan sehari-hari dari waktu ke waktu, barang-barang rumah tangga semakin mahal sehingga hal ini akan mendorong nelayan untuk mengambil tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga mereka (Hamzah and Nurdin 2021).

Nelayan adalah penduduk pesisir dan mata pencaharian ekonomi mereka secara langsung bergantung pada kegiatan pengolahan sumber daya laut. Masyarakat nelayan adalah sekelompok orang yang hidup dari hasil laut dan tinggal di desa pesisir atau pesisir (Sastrawidjaya, 2002). Ciri-ciri masyarakat nelayan dapat dilihat dalam berbagai aspek, sebagai berikut:

1. Dari segi mata pencaharian, nelayan adalah mereka yang memiliki kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan laut dan pesisir, atau mereka yang mencari nafkah.
2. Dari segi gaya hidup, masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang kooperatif. Kebutuhan untuk saling mendukung dan membantu dikatakan penting ketika dihadapkan pada situasi yang membutuhkan biaya dan tenaga yang besar, seperti ketika mendayung perahu, membangun rumah atau memecahkan ombak di sekitar desa.
3. Dari segi penampilan, meskipun pekerjaan seorang nelayan berat, biasanya ia hanya memiliki keterampilan yang sederhana.

### **1.5.3 Pandemi covid-19**

Di penghujung tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, berita tentang kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebab pastinya mengguncang dunia. Wabah ini pertama kali terdeteksi sebanyak kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Sebagian besar dari pasien pneumonia ini berasal dari pedagang Pasar Huanan yang menjual hewan hidup di Kota Wuhan. 7 Januari 2020 Peneliti berhasil mengidentifikasi penyebab pneumonia ini semacam virus corona baru secara resmi.

WHO memberi nama penyakit itu Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) dan nama virusnya Ini adalah SARS-CoV-2 (sangat akut sindrom pernapasan coronavirus 2 (Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya, and Siska Mawaddatunnadila 2021).

Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) merupakan jenis penyakit baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Virus yang menyebabkan COVID-19 disebut Sars-CoV-2. Coronavirus adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia), tetapi hewan penyebab penyebaran COVID-19 belum diketahui.

Indonesia adalah negara berkembang dan negara terpadat keempat di dunia dan oleh karena itu diperkirakan akan menderita lama dan keras. Ketika coronavirus SARS-CoV2 menghantam China paling parah antara Desember 2019 dan Februari 2020. Pada 27 Januari 2020, Indonesia memberlakukan pembatasan perjalanan dari Provinsi Hubei, yang saat itu menjadi pusat penyebaran COVID-19 global, sambil mengevakuasi 238 WNI dari Wuhan (Putri 2020).

WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi pada 12 Maret 2020. Jumlah kasus di Indonesia terus meningkat pesat dengan 31.186 kasus terkonfirmasi dan 1.851 kematian per Juni 2020. Jumlah kasus tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta dengan 7.623 kasus yang dikonfirmasi dan 523 (6,9%) kematian.

WHO menerbitkan enam strategi prioritas untuk diterapkan pemerintah selama tahun ini Penanganan pandemi Covid-19 pada 26 Maret yang

terdiri dari perluasan, pelatihan dan pengerahan tenaga kesehatan; implementasi sistem kejadian yang dicurigai; meningkatkan produksi tes dan meningkatkan perawatan kesehatan; Identifikasi fasilitas yang dapat diubah menjadi pusat kesehatan coronavirus; Kembangkan rencana untuk mengkarantina kasus; dan memfokuskan upaya pemerintah untuk menekan virus (World Health Organization 2021)

## **2.5. Definisi Konsepsional**

### **1.6.1 Collaborative governance**

Tata Kelola Kolaboratif dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah daerah. rangka satu menyelesaikan masalah berkolaborasi dengan masyarakat umum dan orang lain yang terlibat dalam kasus ini prosedur penghapusan masalah tersebut. Sehubungan dengan ini, Kolaborasi dalam Administrasi Publik Pemerintahan adalah salah satunya.

### **1.6.2 Kesejahteraan Nelayan**

Kesejahteraan nelayan yaitu merupakan aspek yang penting bagi nelayan, karena kesejahteraan sendiri merupakan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pokok, merasa cukup sehingga membuat kesejahteraan kita meningkat, semakin tinggi kualitas kesejahteraan semakin tinggi pula kebahagiaan.

### **1.6.3 Pandemi covid-19**

Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) merupakan jenis penyakit baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Virus yang menyebabkan COVID-19 disebut Sars-CoV-2. Coronavirus adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia), tetapi hewan penyebab penyebaran COVID-19 belum diketahui.

## 2.6. Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Aktor yang terlibat dalam peningkatan kesejahteraan nelayan	Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia</li> <li>2. TNI/POLRI/KSOP</li> <li>3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau</li> <li>4. Dinas Perikanan Kabupaten Karimun</li> <li>5. BUMN/BUMD</li> </ol>
		Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nelayan desa Pangke</li> <li>2. Komunitas Masyarakat desa Pangke</li> </ol>
		Swasta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Saipem</li> <li>2. PT. Timah</li> <li>3. Bank Riau</li> </ol>
2.	Proses peningkatan kesejahteraan nelayan dalam prespektif <i>collaborative governance</i>	<i>Face to face dialoge</i>	Pemerintah dan masyarakat mengadakan pertemuan sebelum adanya kegiatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan nelayan di desa Pangke pasca pandemic covid-19/.
		Trust building	Pemerintah dan masyarakat menciptakan rasa percaya selama meningkatkan kesejahteraan nelayan pasca pandemic covid-19 di desa Pangke
		Share understanding	Pemerintah dan masyarakat memberikan atau membagi ide dan pemahaman terkait peningkatakn kesejahteraan nelayan di desa pangke pasca pandemic covid-19.
		Commitment process	Pemerintah dan masyarakat harus berkomitmen dalam melaksanakan peningkatan kesejahteraan nelayan pasca pandemic covid-19.
		Intermediate outcomes	Setelah dilakukan kolaborasi pemerintah dan masyarakat bisa melihat hasil yang telah mereka lakukan dalam peningkatan

			kesejahteraan nelayan pasca pandemic covid-19.
--	--	--	--

Tabel 1. 1 definisi Operasional

## 2.7. Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisa peningkatan kesejahteraan nelayan pasca pandemic covid-19 di desa Pangke dalam prespektif *collaborative governance*. Peneliti menggunakan metode kualitatif agar dapat meneliti lebih jauh mengenai peningkatan kesejahteraan nelayan pasca pandemic covid-19 di desa Pangke dalam prespektif *collaborative governance* melalui wawancara dan dokumentasi sebagai data pendukung. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi. Untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai yang di harapkan maka akan dilakukan survey pengambilan data terhadap Nelayan di Desa Pangke Barat Tanjung Balai Karimun yang merasa kesejahteraannya menurun akibat adanya covid-19 ini. Pendekatan yang dilakukan dengan kualitatif di harapkan oleh peneliti yaitu untk menghasilkan data yang deskriptif dengan tujuan. Penggunaan deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberi deskripsi yang cukup bagi penulisan.

### 1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

#### 1) Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang ((Sugiyono 2018)Subjek penelitian ini adalah nelayan, dinas perikanan dan pemerintah daerah di Tanjung Balai Karimun.

## 2) Objek Penelitian

Objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono 2018). Objek penelitian ini adalah kolaborasi peningkatan kesejahteraan nelayan pasca pandemic covid-19 di desa Pangke dalam prespektif *collaborative governance*.

### 1.8.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Pangke, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Adapun alasan memilih lokasi tersebut karena beberapa warga di Desa pangke berptofesi sebagai nelayan.

### 1.8.4 Unit Analisis

Menurut Arikunto (2010, hlm. 187) adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai penelitian. Dalam pengertian yang lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Unit analisa dlaam penelitian ini yakni peningkatan kesejahteraan nelayan pasca pandemic covid-19 di desa Pangke dalam prespektif *collaborative governance*.

### 1.8.5 Jenis Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan dua jenis pengambilan data yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasanya dilakukan oleh peneliti (Umar 2017) Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara bersama:

- Nelayan yang bernama Jemahat, beliau akan menjadi perwakilan narasumber tentang bagaimana kehidupan nelayan era pandemic dan pasca pandemic.
- Dinas Perikanan, akan menjadi narasumber dalam penelitian peningkatan kesejahteraan nelayan pasca pandemic covid-19 di desa Pangke dalam prespektif *collaborative governance*.
- Pemerintah Daerah akan menjadi nara sumber wawancara dalam peningkatan kesejahteraan nelayan pasca pandemic covid-19 di desa Pangke dalam prespektif *collaborative governance* Masyarakat Desa Pangke akan menjadi nara sumber wawancara dalam peningkatan kesejahteraan nelayan pasca pandemic covid-19 di desa Pangke dalam prespektif *collaborative governance*.

## 2) Data sekunder.

Data sekunder data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya tabel atau diagram (Umar 2017).

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengadaan primer guna keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan proses mengumpulkan data yang relevan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Ridwan (2010:51), teknik pengumpulan data adalah salah satu metode yang ada di dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik atau cara yang digunakan oleh para

peneliti untuk mengumpulkan data. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu wawancara, dan dokumentasi.

#### 1) Wawancara

Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Berikut informan yang di wawancarai oleh narasumber pada saat melakukan penelitian:

No	Nama	Jabatan
1	Dedy Irawan, S.Pi, MM	Ketua Pemberdayaan Nelayan
2	Kamsimah	Kepala Desa Pangke
3	Fitra	Masyarakat
4	Jemahat	Nelayan

Tabel 1. 2 Daftar wawancara

#### 2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Salah satu dokumentasi yang di pakai untuk memenuhi penelitian ini yaitu melalui Data dari Dinas Perikanan di website Dinas Perikanan kabupaten Karimun.

### 1.8.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut (Sugiyono 2018) adalah proses pencarian dan kompilasi sistematis diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan

dokumentasi, dengan bagaimana mengatur data ke dalam kategori, memecah menjadi unit, melakukan sintesis, susun menjadi pola, pilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa dari data yang dibutuhkan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara langsung kepada pihak responden terkait yang menyangkut tema : Kolaborasi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan era pandemic dan pasca pandemic covid-19. Menurut (Sugiyono 2018) penelitian ini terdapat empat langkah analisis data kualitatif, diantaranya adalah:

- 1) Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti harus mencari data sesuai yang dibutuhkan secara langsung di lapangan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya dan pengumpulan dokumen-dokumen terkait.

- 2) Reduksi Data Reduksi data diartikan sebagai pemusatan, pemilihan, penyederhanaan pada data-data kasar yang berasal dari pengumpulan data saat di lapangan.

- 3) Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah untuk menyusun atau memberi gambaran terkait data-data yang telah diperoleh lalu diringkas serta disajikan dalam bentuk laporan sistematis yang jelas dan mudah dimengerti.

#### 4) Penarikan Kesimpulan

Langkah ini merupakan tahap akhir analisis data dimana peneliti harus menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh dan sudah direduksi sebestumnya dalam bentuk suatu laporan dengan cara membandingkan dan menggabungkan terkait permasalahan sehingga mampu menjawab semua permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini